

**Drs. SADIANI, M.H.**

PENGANTAR BUKU:  
**DR. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**

EDITOR:  
**FADLI RAHMAN**



# *Nikah* *via* *Telepon*

**Menggagas  
Pembaharuan  
Hukum Perkawinan di  
Indonesia**



STAIN

3



memberikan saran pemikiran dan sumber rujukan sehingga mempertajam sudut pandang penulisan ini. Terima kasih pula kepada Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., yang telah memberikan pengantar buku ini.

Ucapan terima kasih pula kepada, Ibnu Elmi AS Pelu atas segala ide-ide yang penuh inspirasi dan inovasi yang berharga dalam mempertajam beberapa draft buku ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Fadli Rahman yang telah memberikan support sekaligus sebagai editor buku ini.

Dalam kesempatan ini pula saya sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Drs. H. Ahmad Syar'i, M.Pd. dan Drs. H. Sardimi, M.Ag. (Ketua dan PK-1 STAIN Palangka Raya) atas dukungan yang tulus dalam penerbitan buku ini guna pengembangan hukum Islam. Terima kasih juga kepada Institute For Strengthening Society Studies (In-TRANS) Publishing Malang, yang bersedia bekerja sama menerbitkan buku ini.

Untuk Ibu Bapak-ku yang dengan ridho dan ikhlas mendo'akan, isteri dan anaku yang terus mendukung penulisan buku ini untuk pengembangan Ilmu Hukum. Untuk itu secara khusus pula ungkapan terima kasih ini disampaikan kepada mereka, semoga dengan adanya karya ini mereka mendapat biasan ridho dari Allah Swt.

Palangka Raya, Januari 2008.

**SADIANI**

## **PENGANTAR BUKU**

*Dr. H. Abdurrahman, S. H., M. H.*

**K**emajuan teknologi dewasa ini telah membias pada perubahan kehidupan. Selanjutnya, kemajuan itu pula yang kemudian mengantarkan kita kepada perlu atau tidaknya perkembangan hukum bagi masyarakat pengguna teknologi.

Sehubungan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat sebagai pengguna teknologi dimaksud, maka norma hukum yang telah dihasilkan sebelumnya, tentu belum mampu memenuhi semua kebutuhan hukum masyarakat, sehingga diperlukan payung hukum yang dapat mengakomodir kepentingan tersebut.

Lebih-lebih di zaman mutakhir sekarang ini, di mana semua lini kehidupan masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Konsekwensinya, betapa pun cepatnya badan



# NIKAH VIA TELEPON

Menggagas Pembaharuan  
Hukum Perkawinan di Indonesia

x, 220 hlm  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
copyright©SETARA Press 2008

**Drs. SADIANI M. H.**  
Editor: Fadli Rahman

TGL. TERIMA	.....
ASAL	.....
HARGA	.....
NO. KLAS	.....
NO. INDUK	27.655/09. (Kelompok In-TRANS Publishing)

Cetakan pertama April 2008

Diterbitkan atas kerjasama  
**INTIMEDIA**

(Kelompok In-TRANS Publishing)

Dan

**STAIN PALANGKARAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre  
Palangkaraya Kalimantan Tengah 733111

Didistribusikan oleh  
**In-TRANS Publishing**  
Jl. Raya Tlogomas VIII/52,  
Rt.04/05 Tlogomas Malang Jatim  
e-mail: Intrans\_malang@yahoo.com

ISBN : 978-979-17613-0-7

## DARI PENULIS

**K**arya ini pada awalnya merupakan hasil riset penyelesaian studi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Selanjutnya, penulis wujudkan dalam bentuk buku yang mendapat dukungan dua lembaga akademis; Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, serta motivasi dari sejumlah orang. Karenanya, penulis ungkapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak atas terwujudnya buku tentang **Nikah via Telepon**, Menggagas Pembaharuan Hukum di Indonesia.

Penghargaan dan terima kasih ini juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Syamsul Wahidin, S.H.,M.S., yang membuka inspirasi dan cakrawala saya mengangkat tema penulisan ini, H.A Chadari Aedy ADP, S.H., M.H. dan Mahyuni, S.H.,M.H. (Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UNLAM Banjarmasin), yang telah membimbing dan



legislatif bekerja untuk merumuskan suatu peraturan, namun persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat yang memerlukan payung hukum, jauh lebih cepat lagi. Akibatnya, banyak persoalan dalam masyarakat yang belum memiliki peraturan kongkrit untuk mengatasinya.

Di antara persoalan hukum yang merupakan bias kemajuan teknologi tersebut adalah perkawinan via telepon, yang telah mendapat pengesahan melalui Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 1989. Ketetapan Pengadilan Agama tersebut kemudian justru berkembang dalam silang pendapat tentang status keabsahan perkawinan via telepon ini. Fokus masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan ternyata tidak dalam "satu majelis", sebagaimana lazimnya yang berlaku di kalangan umat Islam, yang *notabene* mengacu pada pendapat ulama mazhab, yang di masa itu belum bersentuhan langsung dengan peradaban teknologi canggih sebagaimana masa sekarang.

Menanggapi persoalan tersebut, Saudara Drs. Sadiani, M. H. mencoba mengkonstruksi konsep-konsep hukum dalam dimensi filosofis, dalam kerangka mengisi kekosongan hukum dalam tatanan yuridis, serta untuk menjawab fenomena sosiologis yang sedang berkembang ini. Semoga, karya akademik ini memberi kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan pemikiran hukum, terutama sekali dalam rangka menyikapi kontroversi seputar sah tidaknya akad nikah

dengan menggunakan alat telepon, ataupun alat-alat lainnya yang sejenis, mengingat teknologi tersebut semakin hari kian berkembang.

Jakarta, Januari 2008

**DR. H. ABDURRAHMAN, S. H., M. H.**

Hakim Agung Republik Indonesia, Dosen  
Pascasarjana Ilmu Hukum pada Universitas Negeri  
Lambung Mangkurat, Banjarmasin.



## DAFTAR ISI

Dari Penulis ➔ iii

Pengantar Buku ➔ v

Daftar Isi ➔ ix

### **BERAWAL DARI KASUS**

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/  
P/1989 ➔ 1

### **SEPUTAR SAHNYA SUATU PERNIKAHAN**

Dari Teori, Menuju kepada Kerangka Berpikir ➔ 11

Kedudukan *Ijab* dan *Kabul* dalam Akad Nikah ➔ 16

Persyaratan "Satu Majelis" dalam Pelaksanaan *Ijab*  
dan *Kabul* ➔ 19

Rekonstruksi Hukum, Penafsiran Hukum dan  
Pengisian Kekosongan Hukum ➔ 28

### **KASUS ITU DIPERTIMBANGKAN SECARA HUKUM**

Penetapan Keabsahan Pernikahan via Telepon ➔ 49

Akad Nikah via Telepon ➔ 49



Menilik Latar Belakang Kasus ➡ 52

Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
Nomor 1751/P/1989 ➡ 61

### **SILANG PENDAPAT PARA AHLI**

Tentang Keabsahan Pernikahan via Telepon ➡ 83

Ada yang Menyatakan SAH ➡ 86

Nikah via Telepon Dilarang ➡ 89

Mengapa Berbeda Pendapat? ➡ 90

### **PEMBAHARUAN KETENTUAN PERNIKAHAN**

Konsep Pembaharuan Hukum dalam Hukum  
Islam ➡ 105

Metode Pembaharuan Hukum dalam Hukum  
Islam ➡ 109

Faktor-faktor Penyebab Pembaharuan Hukum  
Islam ➡ 124

### **MENGAGAS PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

Keberlakuan Hukum Perkawinan ➡ 143

Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam  
Perspektif Hukum ➡ 154

Peluang Pembaharuan Hukum dalam Perspektif  
Teori Perubahan Hukum ➡ 168

Kreativitas Hakim sebagai Pembentuk Hukum ➡ 199

## *Bagian Pertama* **BERAWAL DARI KASUS** Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989

**P**erkembangan sangat mendasar terhadap Teknologi Informasi (TI) di awal abad XXI memang begitu pesat, dan perkembangan ini telah menduduki segala lini kehidupan. Terlebih lagi dalam dunia komunikasi yang berbasis kepada kemudahan dalam melakukan hubungan perseorangan secara langsung. Konteksnya dengan hukum Islam yang bersifat universal, maka hukum dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaidah *ushul fikih* itu sendiri, bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan tempat.

Hal ini bisa dilihat pada perkembangan teknologi informasi dalam telekomunikasi itu sendiri. Perkembangan ini telah merasuk dalam berbagai aspek hukum keperdataan secara luas, termasuk



dalam bidang perkawinan. Salah satu indikasinya adalah adanya penggunaan perkembangan telekomunikasi sebagai media melakukan perikatan perkawinan. Akibatnya, keadaan ini kemudian menimbulkan ekses tersendiri di berbagai kalangan tentang akibat hukum dari perilaku perkawinan lewat perkembangan di bidang telekomunikasi dimaksud.

Permasalahannya sekarang, hukum positif ternyata belum mengatur secara spesifik tentang kaidah perkawinan melalui jalur telekomunikasi, sementara perkembangan teknologi informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan substansi hukum, perangkat hukum dan sumber daya manusia di bidang aparatur penegak hukum, demi menjangkau dan menyelesaikan persoalan hukum dalam bingkai teknologi informatika. Kedudukan Kebijakan Publik pada masyarakat pasca-industri (*post industrial society*) jika diakronimkan dengan Mapasin menjadi bagian sangat penting, karena pada masyarakat tersebut terjadi berbagai perubahan yang serba radikal dan fundamental. Perubahan radikal terjadi pada elemen yang menyangkut sisi perangkat penunjang yang terdiri dari fasilitas hidup dengan segala konsekuensinya. Fasilitas dimaksud berasal dari pengembangan energi atau sumber daya (sufra-struktur dan infra-struktur) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya kreatif manusia untuk mempermudah kesehariannya.

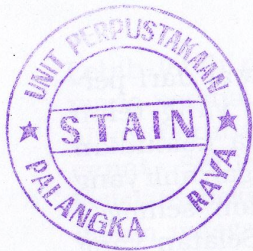
Tidak aneh jika ternyata hal menarik yang muncul akhir-akhir ini pun tidak jauh dari masalah

yang dikemukakan di atas, yakni persoalan akad nikah melalui telepon. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian lebih mendalam. Suatu kajian yang bukan saja ditujukan kepada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang pengesahan praktik tersebut, tetapi kajian yang lebih komprehensif, sebab persoalan ini diduga akan muncul dalam bentuk lain dari yang telah terjadi. Meski masih menggunakan telepon, namun selain dapat didengar suaranya, juga dapat dilihat gambar orang yang sedang berbicara, layaknya seperti *video call* atau *teleconference*.

Mengingat masalah ini merupakan persoalan baru di bidang hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia, maka diperlukan pengkajian strategis dari dua bidang hukum untuk menjawab persoalan ini. Hal ini dimaksudkan mengingat fungsi hukum itu sendiri merupakan bagian yang integral dari inisiatif kebijakan, maka perumusan hukum kebijakan dan implementasinya di era teknologi mesti juga memperhatikan keberadaan masyarakat yang memerlukan informasi teknologi, guna memudahkan hubungan dengan pihak lain melalui ruang maya, tanpa harus bertemu dan bertatap muka dalam suatu tempat atau daerah tertentu dengan menggunakan teknologi terpadu, komunikasi terkendali dalam batas dan ruang tertentu.

Lebih jauh, Alvin Toffler menggambarkan tentang *future shock* dari dampak percepatan perubahan teknologi dan sosial merupakan "kejutan masa depan", dengan maksud menjelaskan





## *Bagian Kedua* **SEPUTAR SAHNYA SUATU PERNIKAHAN**

Dari Teori, Menuju kepada Kerangka Berpikir

**S**engaja bagian ini disusun lebih awal dari pembahasan utama buku ini guna lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya, yakni menyangkut hasil penetapan keabsahan pernikahan via telepon sebagai obyek yang dikaji, serta untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta dalam menganalisis sebuah permasalahan atau kasus. Beberapa teori yang dimunculkan pada bagian ini adalah berpijak pada suatu kerangka berpikir tentang seputar syarat sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam yang mengharuskan pelaksanaan akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dihubungkan dengan praktik perkawinan melalui media telepon.

Becara umum, asumsi yang bisa kita bangun adalah bahwa Indonesia sebagai negara hukum



beraliran hukum positifisme yuridis<sup>1</sup>. Perkawinan yang dilihat pada konteks hukum ini adalah perkawinan bagi orang yang beragama Islam, yang tunduk pada ketentuan hukum positif, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, perkawinan menurut teori positivis yuridis dinyatakan dapat diterima sebagai perkawinan yang berkekuatan hukum apabila sudah memenuhi ketentuan hukum, yakni apabila telah ditentukan secara positif oleh negara. Sederhananya, hukum hanya berlaku apabila hukum itu mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara), yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama atau KUA, bagi orang-orang yang beragama Islam. Norma-norma kritis yang ada hubungannya dengan rasa keadilan dalam hati nurani manusia seringkali tidak mempunyai tempat dalam sistem sosiologis seperti ini.<sup>2</sup>

Dari sini, maka perkawinan – jika dilihat dari teori tersebut – harus dilakukan pencatatan sebagai aturan hukum positifnya. Sedangkan mengenai proses pelaksanaan akad nikah bisa dilakukan di

<sup>1</sup> Positivisme Yuridis dipelopori oleh hukum humanisme, antara lain Jean Bodin dengan ide-idenya tentang kedaulatan Raja. Tokoh Positivisme Yuridis juga menganut pandangan bahwa hanya apa yang ditetapkan sebagai kenyataanlah yang dapat diterima sebagai kebenaran. Positivisme sebagai sistem filsafat muncul pada awal abad XIX M., tokoh-nya adalah Auguste Comte (1788-1857 M) dan Herbert Spencer (1820-1903 M). lihat Theo Huijber. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 122-130.

<sup>2</sup> Arief Budiman. 1991. *Negara dan Pembangunan*. Jakarta : Padi dan Kompas. Hal. 19-21.

rumah, di Kantor Urusan Agama, ataupun melalui media elektronik (telepon), tentu tidak dipermasalahkan. Sebab, dengan adanya pencatatan perkawinan, maka pelaksanaan akad nikah sudah dianggap legal menurut hukum positif. Konteks yang ingin kita arahkan pada masalah perkawinan dalam bagian ini adalah teori yang mengacu pada aliran positivis yuridis.

Menurut paham ini, perkawinan bagi orang Islam berarti mengikuti Islam secara utuh (*kaffah*), termasuk di dalamnya menganut sistem politiknya. Dalam sistem politik ketatanegaraan Islam, peran penguasa dalam hal ini adalah pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam persoalan syariat Islam, mengikuti pemerintah (negara) ini adalah sebuah keniscayaan, kalau tidak disebut wajib. Karena sebagaimana ajaran Islam, persoalan syariat tidak dapat dilepaskan dari peran negara (kekuasaan), karena dalam doktrin Islam, syariat akan tegak kukuh jika ditopang oleh kekuasaan negara. ✓

✓Nikah<sup>3</sup> (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri, antara seorang pria dengan seorang wanita. ✓

Rumusan tentang ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam konteks buku ini adalah perkawinan dalam lingkup keberlakuan bagi

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Perundang-Undangan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. IV, Jakarta : Bina Aksara. Hal. 1.



## Bagian Ketiga

# KASUS ITU DIPERTIMBANGKAN SECARA HUKUM

PENCETAPAN Keabsahan Pernikahan via Telepon

### Akad Nikah via Telepon

Sebelum lebih jauh berbicara perihal keabsahan nikah via telepon, ada baiknya kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pernikahan (baca: perkawinan) dan akad nikah.

Pernikahan, atau biasa juga disebut perkawinan, ternyata memiliki beberapa teori yang terhubung dengan rumusan definisi atau istilah yang kita gunakan ini. Nikah atau kawin menurut bahasa (*etymologist*) ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo. 2002 *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Perundang-undangan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. IV. Jakarta : Bina Aksara. Hal. 1.



Sementara itu, kata akad, menurut Abu Zahrah dalam kutipan Achmad Kuzari, yaitu sesuatu yang mengakibatkan hukum halal pergaulan antara laki-laki dengan perempuan, dan pertolongan serta pembatasan milik, hak dan kewajiban mereka<sup>2</sup>. Sedangkan Sayuti Thalib menyatakan akad nikah ialah perjanjian mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki<sup>3</sup>.

Dengan nada yang sama, Soemiyati menyatakan bahwa akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikat diri mereka dengan tali perkawinan, dengan menggunakan kata-kata *ijab-kabul*<sup>4</sup>. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1) dinyatakan bahwa akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali, dan *kabul* oleh mempelai pria atau wakilnya, dengan disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>5</sup>

Rumusan tentang ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam konteks ini adalah perkawinan dalam lingkup keberlakuan bagi penganut agama Islam, di mana sebelum dilakukannya pesta perkawinan (walimah), maka kedua calon mempelai wajib melakukan akad nikah. Adapun pengertian akad berarti pelaksanaan nikah dengan *ijab* dan *kabul*<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Achmad Kuzari. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Rajawali Press. Hal. 11.

<sup>3</sup> Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI-Press. Hal. 63

<sup>4</sup> Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty. Hal. 53.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Hal. 13

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 15.

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, dapat disepakati bahwa akad nikah merupakan perjanjian antara seorang wanita dengan seorang pria guna mengikat diri dalam suatu perkawinan, melalui rangkaian *ijab-kabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan mahar yang telah ditentukan dengan menghadirkan dua orang saksi. Sebagai akibat hukum dari sahnya pelaksanaan akad nikah, maka hubungan suami-isteri menjadi halal, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua pasangan dalam membina rumah tangga.

Adapun perihal akad nikah pada dasarnya dilakukan atas suka sama suka oleh kedua calon pasangan, maka akad nikah atau *ijab-kabul* merupakan unsur yang mendasar bagi keabsahan pernikahan, sebab dalam pelaksanaannya, *ijab* ucapan wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan *kabul* diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela menyunting calon istrinya.

Bagaimana jika akad pernikahan yang diasumsikan sebagai pernyataan kerelaan kedua calon mempelai dimaksud dilakukan melalui media telepon? Ini bukan hal yang mustahil untuk terjadi mengingat perkembangan teknologi informasi dalam telekomunikasi itu sendiri berkembang sedemikian pesat. Perkembangan ini, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, telah merasuk dalam berbagai aspek hukum keperdataan secara luas, termasuk dalam bidang pernikahan. Salah satu indikasinya adalah adanya penggunaan perkembangan telekomunikasi sebagai media



*Bagian Keempat*  
**SILANG PENDAPAT PARA AHLI**  
Tentang Keabsahan Pernikahan via Telepon

**M**emperhatikan peristiwa pernikahan melalui media telepon yang terjadi pada tahun 1989—jika mengacu pada kasus posisi yang telah di gambarkan sebelumnya, dan dihubungkan dengan pembuktian pada persidangan di depan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan—tentunya pernikahan tersebut bukanlah sebagai uji coba sarana telekomunikasi telepon, melainkan karena ada kondisi jarak yang sangat jauh dan faktor ketidakmampuan dalam pengadaan biaya transportasi untuk mempertemukan kedua belah demi melakukan akad nikah dalam satu majelis. Inilah faktor utama yang melatarbelakangi peristiwa pernikahan tersebut harus dilakukan.

Peristiwa pernikahan menggunakan sarana telepon tersebut pada dasarnya merupakan peristiwa yang tidak lazim atau belum pernah



terjadi di kalangan umat Islam. Dikatakan demikian, karena peristiwa nikah jarak jauh dalam hukum Islam hanya dapat dilakukan melalui perwakilan, baik melalui surat pernyataan yang dikirim, atau dengan cara mengutus atau mewakilkan seseorang untuk datang menghadap kepada pihak keluarga atau wali mempelai wanita untuk proses pelaksanaan akad nikah.

Dalam kajian sosiologi hukum, pada setiap peristiwa hukum akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa yang akan berdampak pada perubahan hukum, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun yang berasal dari luar masyarakat. Proses perubahan sosial tersebut dapat saja terjadi melalui berbagai sebab dan sarana atau fasilitas pendukung lain yang tersedia ketika peristiwa tersebut terjadi<sup>20</sup>. Peristiwa ini kemudian memunculkan peraturan baru guna penyempurnaan peraturan hukum yang telah ada, sesuai dengan kebutuhan masa sekarang. Dalam rangka mengubah suatu aturan perundang-undangan, tidak perlu ada "bongkar pasang" secara keseluruhan, tetapi cukup memperbaiki bagian-bagian yang tidak cocok lagi dengan kondisi perkembangan masyarakat sekarang.

Selain jarak dan ketiadaan dana sebagai alasan utama, pihak keluarga dan kedua pasangan pengantin sudah lama menjalin keakraban sebelumnya. Dengan adanya saling mengenal antara kedua pasangan dan juga pihak keluarga

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta. Bina Aksara. Hal. 17.

tersebut, maka untuk merealisasikan niatnya demi bersatu dalam sebuah perkawinan, meski berbeda wilayah, para pihak kemudian melakukan praktik akad nikah dengan menggunakan sarana telepon. Meskipun pernikahan melalui telepon tidak dibenarkan oleh Petugas Kantor Urusan Agama, karena tidak ada dasar hukum yang membolehkan, tetapi nikah terus saja dilangsungkan, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang ditunjuk, para undangan dan juga petugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang tidak mengijinkan pernikahan.

Setelah proses pernikahan selesai, dan telah dicatat oleh petugas pernikahan, ternyata pihak KUA tidak bersedia menerbitkan Akta Nikah karena tidak ada dasar hukum yang mengatur nikah menggunakan telepon. Atas peristiwa tersebut wali pengantin wanita mengajukan permohonan pengesahan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta memperoleh Penetapan No. 1751/P/1989, tentang Pengesahan Praktik Nikah melalui media Telepon.

Lahirnya Penetapan Pengesahan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini justru menimbulkan opini yang berbeda. Sebagaimana tulisan Satria Effendi M. Zein, menyatakan bahwa peristiwa nikah melalui media telepon memerlukan perhatian secara serius, serta perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam, bukan saja ditujukan kepada Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 itu semata, melainkan lebih bersifat menyeluruh, mengingat persoalan lain diduga akan muncul dalam bentuk lain dari



## Bagian Kelima

# PEMBAHARUAN KETENTUAN PERNIKAHAN

### Konsep Pembaharuan Hukum dalam Hukum Islam

Kata "pembaharuan" sering diidentikkan penggunaannya dengan kata *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *rekonstruksi*, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Di antara kata-kata tersebut, yang paling banyak dipergunakan adalah kata *reformasi*, *islah* dan *tajdid*. Reformasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti membentuk atau menyusun kembali.<sup>35</sup> Reformasi sama artinya dengan memperbaharui. Asal katanya adalah "baru", dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru, atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbaharui, proses pengembangan cara hidup yang baru<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> John M. dan Hasan Shadily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT. Gmaedia. Hal 473. Lihat juga Peter Collin. 2000. *Dictionary of Law*. Peter Collin. 3 rd edition. Hal. 311.

<sup>36</sup> Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet ke-3. Jakarta : Balai Putaka. Hal. 82.



*Tajdid* berasal dari bahasa Arab, mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan<sup>37</sup>. Sedangkan *islah* diartikan dengan perbaikan, memperbaiki sesuatu agar dapat memberi faedah atau manfaat<sup>38</sup>. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata *islah* dan *tajdid* sering dipakai secara berdampingan, dengan pengertian yang sama, yaitu "pembaharuan"<sup>39</sup>.

Persoalan hukum yang perlu diperbaharui, selain masalah hubungan manusia dengan tuhan, juga masalah hubungan antar sesama manusia. Konteks tulisan ini memfokuskan hukum yang berhubungan dengan aktivitas sesama manusia, mengingat umumnya kehidupan manusia sangat rentan menjadi objek perubahan karena terkait dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan. Untuk menyikapi terjadinya perubahan dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan kemajuan modernisasi, teknologi dan era globalisasi, di mana norma hukum belum menyentuh secara spesifik terhadap peristiwa-peristiwa kontemporer, maka Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam hadis yang ditulis oleh Muslim<sup>40</sup>:

<sup>37</sup> Lois Malul. 1986. *Al- Munjid Al-Abjady*. Beirut-Libanon : Dar-al-Masyriq. Hal 229.

<sup>38</sup> *Ibid*.

<sup>39</sup> Ahmad Munif Suratmaputra. 2000. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum*. Jakarta : Pustaka Firdaus. Hal 154-155.

<sup>40</sup> Muslim al-Hajjaj. T.th. *Sahih Muslim*. Mesir : Matbaa'ah Misriyyah, wa maktabuha. Jilid II. Hal 340.

أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

*Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.*

Hadis tersebut memberikan gambaran bahwa di masa mendatang, permasalahan dunia senantiasa berkembang, dan perkembangan tersebut hanya diketahui dan dapat diatasi oleh manusia yang hidup ketika itu. Terkait dengan perkembangan dunia masa depan, tidak menutup kemungkinan kalau tidak dikatakan pasti, tentunya akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma atau kaidah hukum sebelumnya. Untuk mengatasi peristiwa baru tersebut diperlukan kreatifitas para yuris untuk menemukan hukum baru guna mengatasinya. Sehubungan dengan itu, sebagaimana digambarkan di atas bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan harus selalu berkembang, Abu Ishak al-Syatibi, dalam kutipan Abdul Wahhab<sup>41</sup>, menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang lentur dan toleran, karena ia mengandung sifat yang tidak mempersulit kepada penganutnya. Selain mengacu pada hadis Nabi di atas, yang menunjukkan perkembangan dunia masa depan memungkinkan terjadinya perubahan hukum, dalam kaidah fikih juga dinyatakan:

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْوَاقِ

*Tidak dapat diingkari, bahwa adanya perubahan hukum lantaran berubahnya waktu (masa)*<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman. 1994. *Pengaruh darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Cet. I. Semarang : Dina utama Semarang. Hal. 15.

<sup>42</sup> Imam Musbikin. *Op. Cit.* Hal. 101.



*Bagian Keenam*  
**MENGAGAS PEMBAHARUAN  
HUKUM PERKAWINAN DI  
INDONESIA**

**Keberlakuan Hukum Perkawinan**

Peraturan perundang-undangan tertulis pada dasarnya menempati posisi yang penting dalam dunia hukum modern saat ini. Demikian halnya dengan Hukum Perkawinan sebagai salah satu sumber hukum perundang-undangan yang diperuntukan menjunjung tinggi nilai keadilan, demokrasi dan kepentingan masyarakat luas. Dalam kajian ilmu hukum, paling tidak, ada 3 (tiga) faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai Keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

**1. Keberlakuan Yuridis**

Yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah akan berlaku jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu, yang di



dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk atau memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus, yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya, kaidah hukum khusus yang lebih rendah mengacu kepada kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

Keberlakuan Yuridis dari kaidah hukum menurut Bagir Manan diperinci dengan syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak demikian, maka peraturan perundangan-undangan tersebut batal demi hukum. Ia dianggap tidak pernah ada, dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama jika diperintah oleh peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaikan bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang tersebut. *Ketiga*, Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan batal demi hukum atau tidak atau belum memiliki kekuatan hukum yang

<sup>1</sup> Keberlakuan yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum murni (*Reine Rechtlehre*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Lebih lanjut perhatikan J.J.H. Brugging. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 150-152.

mengikat. *Keempat*, Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar<sup>2</sup>.

Dari konsep tentang dasar Keberlakuan secara yuridis dari peraturan perundang-undangan dimaksud, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan beberapa pendapat:

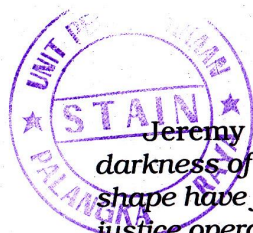
- a. Hans Kelsen pernah berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. W. Zevenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya;
- c. Logemann menjelaskan bahwa kaidah hukum itu mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dengan akibatnya<sup>3</sup>.

Kaitannya dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang Keabsahan Perkawinan Melalui Telepon No. 1751/P/1989, dihubungkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penetapan ini merupakan perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 1989. Peristiwa perkawinan melalui media telepon yang belum memiliki peraturan secara spesifik dalam Undang-Undang

<sup>2</sup> Bagir Manan. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta : IN-HILL-CO. Hal 14-15

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1993. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hal. 88-89





Jeremy Bentham pernah menyatakan: "In the darkness of secrecy, sinister interest and evil in every shape have full swing. Only in proportion as judicial in justice operate. Where there is no publicity there is no justice. Publicity is the very soul of justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of all guard against improbity. It keeps the judge himself white trying under trial."<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Terjemahan ungkapan Bentham: "Dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada di puncak kekuatannya. Hanya dengan keterbukaan, segala bentuk ketidakadilan di lembaga peradilan dapat dihilangkan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah roh keadilan. Keterbukaan adalah alat untuk melawan, serta penjaga utama, dari ketidak jujur. Keterbukaan membuat hakim "diadili" manakala ia mengadili (perkara)." Dikutip dari Rifqi S. Assegaf, dan Josi Khatarina. 2005. Membuka Ketertutupan Pengadilan. Jakarta: Leip. Hal. 1.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah, Sulaiman. 1995. *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibelitasnya*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.

———. 1996. *Dinamika Qiyas Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.

Abu Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim. 1994. *Pengaruh darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Cet. I. Semarang : Dina utama.

Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail. 1981. *Shahih al-Bukhari*. Juz IV. Mesir : Darul Fikr.

Al Haitami, Ibnu Hajar. T.th. *Tuhfatul Muhtaj*. Jilid 7. Beirut Libanon : Darul Fikr

Al Hajjaj Muslim. T.th. *Sahih Muslim*. Jilid II. .Mesir : Matbaa'ah Misriyyah, wa maktabuha.



- Al Jaziri, Abdurrahman. 1990. *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*. Juz 4. Beirut Libanon : Darul Fikr.
- Al Kattani, Abdul Hayyie. Dkk. (trans). 2002. *Fiqh Praktis, bagi kehidupan modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Yusuf Al-Qardhawi. 1999. *Taisirul-Fiqhi Lil-Muslimin-Muashiri fi Dahu'il-Qur'ani was Sunnah*.
- Al Tirmidzi, 1994. *Sunan al-Tirmidzi*. Juz. I. Beirut : Dar al-Fikr
- Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam*. Cet. V. Jakarta : Raja Wali Press.
- Amirin, Tatang M. 2001. *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Cet. VII. Jakarta : Rajawali Press.
- Amos, H.F. Abraham. 2004. *Legal Opinion*. Cetakan ke 1. Jakarta : Rajawali Press.
- An-Nawawi. 1994. *Al-Majmu*. Jilid 2. Beirut Libanon : Darul Fikr.
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Cet I. Bandung : Alumni.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Cetakan I. Edisi ke II. Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- \_\_\_\_\_. 1982. *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta : Tinta Mas.
- Assegaf, Rifqi S. dan Josi Khatarina. 2005. *Membuka Ketertutupan Pengadilan*. Jakarta : Leip.

- Bakhtiar, Amsal. 2004. *Filsafat Ilmu*. Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syariah, menurut Al-Syatibi*. Cetakan I. Jakarta : rajawali Press.
- Brugging, J.J.H.. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Budiman, Arief. 1991. *Negara dan Pembangunan*. Jakarta : Padi dan Kapas.
- Collin, Peter. 2000. *Dictionary of Law*. Peter Collin. 3 rd edition.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 1. Jakarta : Ichtiar Baru van Hove.
- Daud, Abu. 1994. *Sunan Abu Daud*. Jilid 2. Kairo : Musrafa al-babil al-Halabi.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Agama. RI. 1994. *Inventarisasi Masalah Ke-penghulu-an*. Surabaya
- \_\_\_\_\_. 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1994. *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*. Bandung : Mandar Maju.



Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta : Logos.

Donuhue, Jhon J. dan Jhon L. Esposito. 1995. *Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Cet. V. Jakarta : Rajawali Press.

Effendi, Satria. 2004. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta : Prenada Media.

Friedman, Lawrence M.. 1975. *The Legal System: Social Science Perspective*. New York : Russel Sage Foundation.

Gillisen, John dan Frits. 2005. *Sejarah Hukum , Suatu Pengantar*. Bandung Refika Aditama.

Glasse, Cyril. 1999. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Habieb, Sa'di Abu. (trans) Sahal Mahfuz. 1997. *Ensiklopedi Ijmak*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Hadjon, Philipus M. dan Titiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Cetakan Ke 1. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Hamka. 2000. *Tafsir Al-Azhar*. Juz XIII-XIV. Jakarta : Pustaka Panjimas.

Haroen. Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Cetakan II. Jakarta : Logos.

———. 1997. *Ushul Fiqh 2*. Cetakan II. Jakarta : Logos.

Hartono, Sunarjati. 1986. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung : Alumi

Hartono, Sunaryati C.F.G. 1994. *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20*. Edisi.I. Alumni. Bandung.

Huijber, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Kamil, Ahmad dan Fauzan. 2005. *Kaidah-Kaidah Hukum Jurisprudence*. Jakarta : Prenada Media.

Khallaf, Abdul Wahab. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Cet. IV. Jakarta : Rineka Cipta.

———. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Cet. V. Jakarta : Rajawali Press.

Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta : Rajawali Press.

M, John. dan Hasan Shadily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.

Makarini, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematik, Suatu Kompilasi kajian*. Cet. I. Jakarta : Rajawali Press.

Malul, Lois. 1986. *Al- Munjid Al-Abjady*. Beirut-Libanon : Dar-al-Masyriq.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta : IN-HILL-CO.

Manan, H. Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cet ke 1. Jakarta : Prenada Media.



Mansur, Didik M. Arief. 2005. *Cyber law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Cet. I. Bandung : Aditama.

Mugniyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta : Lentera.

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Cet. II. Jakarta : Kencana.

Muhajir, H. Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. IV Yogyakarta : Rake Sarasin.

Musbikin, Imam. 2001. *Qawaid al-Fiqhiyah* Cet. I. Jakarta : Rajawali Pers.

Mustafa, Adib Bisri (trans) Imam Muslim. 1993. *Shahih Muslim*. Jilid 3. Semarang : Asy-Syifa.

Nasution, Zainuddin. 2001. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung : PT. Rosda Karya.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II. Jakarta Prenada Media.

O'dea, Thomas. 1985. *Sosiologi Agama: Suatu Pengantar*. Jakarta. CV Rajawali.

*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. 2005. Banjarmasin : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : Universitas Islam.

Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke III. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Soetjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Angkasa.

Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Perundang-Undangan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. IV. Jakarta : Bina Aksara.

Rusli, Nasrun. 1999. *Konsep Ijtihad Al-Syaukan, Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta : Logos.

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah*. Juz II. Libanon Beirut : Darul Fikr.

Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet. I. Bandung ; Aditama.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2. Cet I. Jakarta : Lentera Hati.

Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Cet. II. Bandung : Mandar Maju.

Shidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Bandung : Universitas Parah yangan Press.



Sirajuddin dkk. 2006. *Legislative Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Cet-1. Jakarta : YAPPIKA.

Soan, M. Sholeh. 2004. *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam pandangan Islam*. Bandung : Agung Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet III. Jakarta : Universitas Indonesia.

——— dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Cet. VI. Jakarta Utara : CV. Rajawali.

———. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan ke 6. Jakarta : Rajawali Press.

——— dan Purmadi Purbacaraka. 1993. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.

Sulaiman, Abdul Wahhab Ibrahim Abu. 1994. *Pengaruh darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Cet. I. Semarang : Dina utama Semarang.

Suratmaputra, Ahmad Munif. 2000. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Cet. Ke II. Bandung : Citra Aditya Bakkti.

———. 2000. *Buku Materi dasar Hukum Acara Perdata*. Cet. II. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syarifudin, Amir. 1999. *Usul Fiqh 1*. Cetakan I. Jakarta : Logos

———. 1999. *Ushul Fiqh 2*. Cetakan I. Jakarta : Logos

———. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Cet. I. Jakarta : Ciputat Press.

Taneko B. Suleman. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Cet I. Jakarta : Rajawali Press.

Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI-Press.

Unger, Roberto Mangabeira. 1999. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Cet. I Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta.

Usman, Iskandar. 1994. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta : Rajawali Press.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafis Anshari. ed. 2002. *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*. Cet. III. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Yusdani, Amir Muallim. 2005. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Cetakan I. Yogyakarta : UII Press.



Zuhri, Mohammad. 1992. *Terjemah Sunan At-Tirmidzi. Jilid 2*. Semarang : Asy-Syifa.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1990 tentang Pegawai Pencatat Nikah.

Salinan Penetapan No. 1751/P/1989. tentang Keabsahan Perkawinan Melalui Media Telepon dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

**Surat Kabar:**

Koran Banjarmasin Post. Selasa 9 Januari 2007.